



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT

Jalan Karel Satsuit Tubun No.26, Kota Pontianak 78121

Laman : kalbar.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilkalbar@kemenkum.go.id

Nomor : W.16-PP.04.02- 3269
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Peraturan Kabupaten Mempawah tentang Standar Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah

14 Juli 2025

Yth.
Bupati Kabupaten Mempawah
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Nomor : 100.3.3.2/5069/HK-A Perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Kabupaten Mempawah tentang Standar Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Kabupaten Mempawah tentang Standar Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI

Rancangan Peraturan Kabupaten Mempawah tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, putusan pengadilan dan norma, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Adapun Rancangan Peraturan Kabupaten Mempawah tentang Standar Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah hasil Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Jonny Pesta Simamora

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.
5. Gubernur Kalimantan Barat.